

TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN AF DALAM
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Aditya Rizki Sutjipto
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum. / H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerasan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh AF ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. AF membawa STNK RI dan memaksa RI untuk melakukan pembayaran biaya pajak STNK kendaraan bermotor miliknya dengan melebihi ketentuan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh AF tidak dalam pengaruh daya paksa melainkan atas kehendaknya sendiri, sehingga tindakan yang dilakukan oleh AF dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh AF dapat dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dalam hal ini AF mengetahui bahwa STNK milik RI telah berada di tangannya dan dapat dipergunakan untuk memaksa RI untuk membayarkan sejumlah uang untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, pemerasan pajak kendaraan bermotor, tindak pidana korupsi.

THE CRIME OF EXTORTION COMMITTED BY AF IN THE PAYMENT OF
MOTOR VEHICLE TAX VIEWED FROM THE LAW NUMBER 20 OF 2001
ABOUT THE CHANGES TO LAW NUMBER 31 OF 1999 ON THE
ERADICATION OF THE CRIME OF CORRUPTION

Aditya Rizki Sutjipto
Law Faculty, University of Surabaya
Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum. / H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the responsibility of the extortion of motor vehicle tax committed by AF viewed from the Law Number 20 of 2001 on the changes of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of the Crime of Corruption. AF brings vehicle registration paper and forced RI to made the payment of motor vehicle tax in a higher amount than the applicable provision. The action committed by AF was not under duress, but it was under his own will, so the action could be categorized as a violation of the law. This action could be charged based on the Article 12 letter e Law Number 20 of 2001 on the changes of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of the Crime of Corruption because AF realized that RI's vehicle registration paper was in his possession and could be used to force RI to pay some amount of money for his benefit.

Keywords : crime responsibility, motor tax extortion, crime of corruption.

